

Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya dalam Pemberdayaan Lebah Madu Galo-Galo pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Pasaman

Viona Fazira^{1*}, Zikri Alhadi²

¹² Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya dalam pemberdayaan lebah madu galo-galo pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Pasaman. Penelitian dilaksanakan di Kesatuan Pengelolaan hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya yang beralamat di Jl. Tuanku Rao No.4b, Durian Tinggi, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian menggunakan 3 indikator peran diantaranya peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.

Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.206>

*Correspondence: Viona Fazira

Email: ; vionafazira9@gmail.com

Received: 22-01-2025

Accepted: 22-02-2025

Published: 23-03-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to determine the role of the Pasaman Raya Protected Forest Management Unit (KPHL) in empowering gallo-galo honey bees in the Social Forestry Business Group (KUPS) in Pasaman Regency. The research was carried out at the Pasaman Raya Protected Forest Management Unit (KPHL) located at Jl. Tuanku Rao No.4b, Durian Tinggi, Kec. Lubuk Suhuung, Pasaman Regency, West Sumatra 26318. This research uses qualitative methods with a descriptive type. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The data sources in this research are primary and secondary data. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and data conclusion. The research results used 3 role indicators including active role, participative role and passive role.

Keywords: Role, Empowerment, Protected Forest Management Unit (KPHL)

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan terluas di dunia, yang mencakup sekitar 125,8 juta hektar atau 62,97% dari total wilayah daratannya. Kawasan hutan ini terbagi menjadi tiga fungsi utama yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan masyarakat. Fungsi tersebut adalah Hutan Produksi (HP) seluas 68,8 juta hektar atau 54,71% dari total hutan, yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi kayu dan hasil hutan lainnya; Hutan Konservasi (HK) dengan luas 27,4 juta hektar atau 21,79%, yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati; serta Hutan Lindung yang mencakup 29,57 juta hektar atau 23,51% dari kawasan hutan. Fungsi utama hutan lindung adalah melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mencegah erosi serta degradasi tanah (Pemerintah Indonesia, 2022) (Rohman, 2024a).

Kawasan hutan menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam memberikan udara segar di lingkungannya. Hal tersebut berdampak langsung terhadap kesehatan dan jauh dari polusi (udara kotor) yang dihirup oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Tentunya ini menjadi kewajiban negara dalam menjaga dan mempertahankan kawasan tersebut, karena akan berdampak pada kehidupan disebuah negara (Bakri, 2024a). Pentingnya legalitas dan perlindungan kawasan hutan dalam suatu wilayah pada suatu negara sehingga akan menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup luas di setiap pulau dinusantara. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keadaanya sebagai hutan tetap (Undang Undang Republik Indonesia No.41 /1999).

Sesuai dengan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, dinas kehutanan memiliki peran sebagai penyuluh dimana penyuluhan merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku usaha agar mau, mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar, permodalan dan sumberdaya lainnya (Bahmid, 2024a). Apa yang telah diterangkan diatas merupakan upaya untuk meningkatkan efesiensi, produktifitas, kesejahteraan, pendapatan dan meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (KLHK 2020-2024).

Kawasan hutan banyak dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, saat ini telah mengalami kerusakan dan alih fungsi hutan yang menimbulkan keprihatinan baik secara nasional maupun internasional (Bakri, 2024b). Secara indikatif, kawasan hutan dan lahan yang mengalami kerusakan dan perlu rehabilitasi seluas 116,376,01 Ha lahan kawasan hutan. Dengan merosotnya wilayah hutan di Indonesia karena kurangnya pengawasan dan lemahnya kebijakan dalam pengimplementasiannya oleh pemerintah di setiap daerah. Maka, perlunya peningkatan dan pengawasan hutan secara bersama (Sesanti, 2011).

Posisi KPH merupakan ujung tombak pengelolaan hutan pada level tapak sehingga sangat memungkinkan bagi KPH membangun kerja sama yang intensif dengan masyarakat setempat. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki KPH juga akan mampu mendayagunakan keahliannya dalam pendampingan masyarakat. Peran KPH dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah dijelaskan oleh Setyarso et al. (2014) dengan dasar teori kolaborasi dari Himmelman (1994). Berbagai peran disematkan pada KPH diantaranya sebagai penggagas, katalis, pemberi asistensi teknis, pembangun kapasitas, fasilitator, dan mitra bagi masyarakat pengelola hutan di kawasan hutan Negara. Berbagai peran tersebut perlu dikonfirmasi dari sisi KPH, salah satunya dapat dilihat dari pergeseran sikap KPH (Dove, 1995) menuju sikap ideal yang telah dirumuskan Campbell (1997).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPHL Pasaman Raya Nomor. 522.4/276/KPHL-PR/2024, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan hutan perlu pengembangan usaha perhutanan sosial, kemudian dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial perlu ditetapkan kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya memiliki beberapa peran, di antaranya: melindungi dan mengamankan hutan, mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim, pendampingan dan pembinaan kelompok tani hutan, bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial (Bahmid, 2024b).

Metodologi

Jenis penelitian ini kualitatif dan menggunakan metodologi deskriptif. Menurut definisi Sugiyono (2013), penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai metode penelitian yang mengkaji kondisi suatu objek secara alamiah, dalam pendekatan ini peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Pembahasan

Untuk mengetahui peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya dalam pemberdayaan lebah madu galo-galo pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Pasaman, peneliti menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2001:242) dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dari informan peneliti yang telah ditentukan.

a. Peran Aktif

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya memiliki peran aktif dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) lebah madu galo-galo di

Kabupaten Pasaman, sebagai upaya menciptakan alternatif penghasilan masyarakat yang tetap menjaga kelestarian hutan. KPHL bertanggung jawab memberikan dukungan teknis, fasilitasi, dan pelatihan kepada KUPS dalam metode budidaya lebah yang ramah lingkungan (Rohman, 2024b). Peran ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada penebangan kayu secara ilegal.

Namun, program ini menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan tenaga pendamping, serta kurangnya koordinasi antara KPHL dan KUPS menjadi hambatan yang memengaruhi efektivitas dukungan teknis dan bantuan yang diberikan. Masyarakat yang terlibat dalam program ini juga belum sepenuhnya mengadopsi teknik budidaya modern, dan sebagian dari mereka masih melakukan penebangan liar karena melihatnya sebagai sumber ekonomi yang lebih cepat (Hikmah, 2021).

Berdasarkan pengamatan ini, perlu ada peningkatan pengawasan, koordinasi, dan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Suwito, 2020). Dengan memperkuat peran KPHL dalam pengawasan dan koordinasi, diharapkan program pemberdayaan lebah madu galo-galo dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan hutan lindung di wilayah Pasaman.

Dapat di pahami bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya dalam pemberdayaan lebah madu galo-galo pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Pasaman memiliki peran aktif yang signifikan. Namun, ada sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi program pemberdayaan ini. Maka untuk mencapai keberhasilan yang lebih signifikan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat koordinasi dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan mengatasi kendala sumber daya yang ada. Ini adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan usaha perhutanan sosial dan

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif masyarakat dalam pemberdayaan lebah madu galo-galo di Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kabupaten Pasaman sangat penting untuk keberhasilan program dan pelestarian hutan. Partisipasi aktif dari anggota KUPS, yang terlibat langsung dalam kegiatan budidaya, berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem hutan (Ilham, 2019). Namun, ada tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman anggota tentang teknik budidaya yang ramah lingkungan dan masih adanya praktik penebangan kayu ilegal. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut dan pendampingan intensif dari KPHL, pemerintah, dan akademisi.

Temuan ini menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dan perlunya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan program pemberdayaan. Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah, KPHL, dan masyarakat harus bekerja bersama untuk menciptakan sistem pengelolaan hutan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui usaha seperti budidaya lebah madu, tetapi juga melindungi ekosistem hutan secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat akan lebih efektif jika mereka diberdayakan secara ekonomi dan ekologi, serta didukung oleh kebijakan dan pengawasan yang lebih baik (Kurniati, 2023).

Dapat dipahami bahwa pendapat tersebut menekankan sisi positif dari program terkait peningkatan ekonomi, namun juga menunjukkan kebutuhan akan dukungan tambahan, terutama dalam hal peralatan dan akses ke pasar, serta peningkatan keterampilan budidaya di kalangan anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Tanjung Betung.

c. Peran Pasif

Peran pasif dalam kelompok menunjukkan bahwa kontribusi anggota yang berperan pasif memiliki peran penting dalam keberhasilan program, seperti yang terjadi pada program pemberdayaan lebah madu galo-galo di KUPS. Anggota yang berperan pasif memberikan dukungan dari belakang, memberi ruang bagi anggota yang lebih ahli untuk menangani tugas-tugas teknis (Dako, 2020). Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan KPHL Pasaman Raya mengakui bahwa variasi tingkat partisipasi dalam kelompok adalah hal wajar dan perlu dihargai. Sinergi antara peran aktif dan pasif membantu menjaga keseimbangan dan memastikan keberhasilan ekonomi serta kelestarian ekologi hutan.

Peran pasif juga penting dalam menciptakan keseimbangan dan kelancaran dalam kelompok, dengan memberikan ruang bagi anggota yang lebih ahli untuk menjalankan tugasnya tanpa terganggu oleh terlalu banyak intervensi dari anggota lain. KPHL Pasaman Raya memahami dan menghargai peran pasif sebagai bagian dari keberhasilan kelompok, sambil terus mendukung keseimbangan dan sinergi antara anggota yang lebih aktif dan mereka yang berperan lebih pasif. Kemudian dapat disimpulkan bahwa peran pasif dalam pemberdayaan lebah madu galo-galo di KUPS Kabupaten Pasaman memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas program. Meskipun tidak selalu terlibat langsung dalam aktivitas teknis, anggota yang berperan pasif tetap memberikan sumbangan berharga dengan mendukung proses dan memberi ruang bagi anggota lain yang lebih ahli untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Simpulan

Program pemberdayaan lebah madu galo-galo di KUPS Kabupaten Pasaman menunjukkan pentingnya tiga peran utama, yaitu peran aktif KPHL Pasaman Raya sangat penting dalam memberikan koordinasi, pelatihan, dan pengawasan. Namun, keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang kurang efektif masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Selanjutnya peran partisipatif masyarakat krusial untuk keberhasilan program masih diperlukan peningkatan pemahaman tentang teknik budidaya yang ramah lingkungan dan kolaborasi yang lebih baik antar pihak terkait. Kemudian peran pasif juga berkontribusi dalam mendukung operasional program melalui kegiatan pendukung, menciptakan keseimbangan di dalam kelompok.

Saran

Diharapkan KPHL Pasaman Raya dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak, optimalisasi sumber daya pendukung, Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat dan Penguatan Kolaborasi Lintas dalam pemberdayaan lebah madu galo-galo di Kabupaten Pasaman

Daftar Pustaka

- Arifin, A, & Rachman, I, N, A. "Identifikasi Jenis Pakan Lebah Madu Hutan (Apis dorsata) Di Hutan Lindung Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Ampang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020." *Jurnal Silva Samalas* 3.2 (2020): 76-85.
- Bahmid. (2024a). Assessing Land Rights in Indonesia's Protected Forests: A Case Study of Tormatutung Region. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(3), 1015–1022. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190319>
- Bahmid. (2024b). Assessing Land Rights in Indonesia's Protected Forests: A Case Study of Tormatutung Region. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(3), 1015–1022. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190319>
- Bakri, S. (2024a). The Effect of Community Perceptions on Ecotourism Development: Study at Pesawaran Protected Forest Area, Lampung Province, Indonesia. *AIP Conference Proceedings*, 3001(1). <https://doi.org/10.1063/5.0184129>
- Bakri, S. (2024b). The Effect of Community Perceptions on Ecotourism Development: Study at Pesawaran Protected Forest Area, Lampung Province, Indonesia. *AIP Conference Proceedings*, 3001(1). <https://doi.org/10.1063/5.0184129>

- Dako, F. X. (2020). Contribution of the mutis timau protected forest to community income in the forest management unit of south central timor regency, Timor Island, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(2), 105–113. <https://doi.org/10.7226/JTFM.26.2.105>
- Hamid, H. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (Makasar: De La Macaa, 2018), 10.
- Hastuti, M. & Abdi. "Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) 2.1* (2021): 171-185.
- Hikmah. (2021). Nesting habitat and honey production of asiatic honey bees (*Apis cerana*) in the protected forest in Enrekang Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 886(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/886/1/012111>
- Ilham, Q. P. (2019). Model of multi-stakeholder forest management: A system study of Protected Forest Management Unit in Solok, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 285(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/285/1/012009>
- Kurniati, D. (2023). Marketing of non-timber forest products as products from the Protected Forest Management Unit Batutegi, Lampung, Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 13(4), 723–738. <https://doi.org/10.29244/jpsl.13.4.723-738>
- Mulyana, D. (2005). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : RemaRosdakarya
- Rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020- 2024
- Rohman, F. (2024a). Spatial distribution, age structure, and the impact of habitat conditions on *Myristica teysmannii* population in the Sempu Island and Malang protected forest, Indonesia: implication for conservation. *Botany Letters*. <https://doi.org/10.1080/23818107.2024.2405102>
- Rohman, F. (2024b). Spatial distribution, age structure, and the impact of habitat conditions on *Myristica teysmannii* population in the Sempu Island and Malang protected forest, Indonesia: implication for conservation. *Botany Letters*. <https://doi.org/10.1080/23818107.2024.2405102>
- Sesanti, N. Kurniawan, E, B. Anggeraeni, B. (2011). Optimasi Hutan Sebagai Penghasil Oksigen Kota Malang. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Volume 3, Nomor 1, Juli 2011
- Soekanto, Soerjono, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers
- Suwito, D. (2020). Peat swamp forest-fires impacts on local livelihoods: A case study in Kapuas Kahayan Protected Forest Management Unit, Central Kalimantan, Indonesia.

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 451(1).

<https://doi.org/10.1088/1755-1315/451/1/012097>

Surat Keputusan Kepala KPHL Pasaman Raya Nomor. 522.4/276/KPHL-PR/2024

Undang Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan